

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 -2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014–2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018 yaitu

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

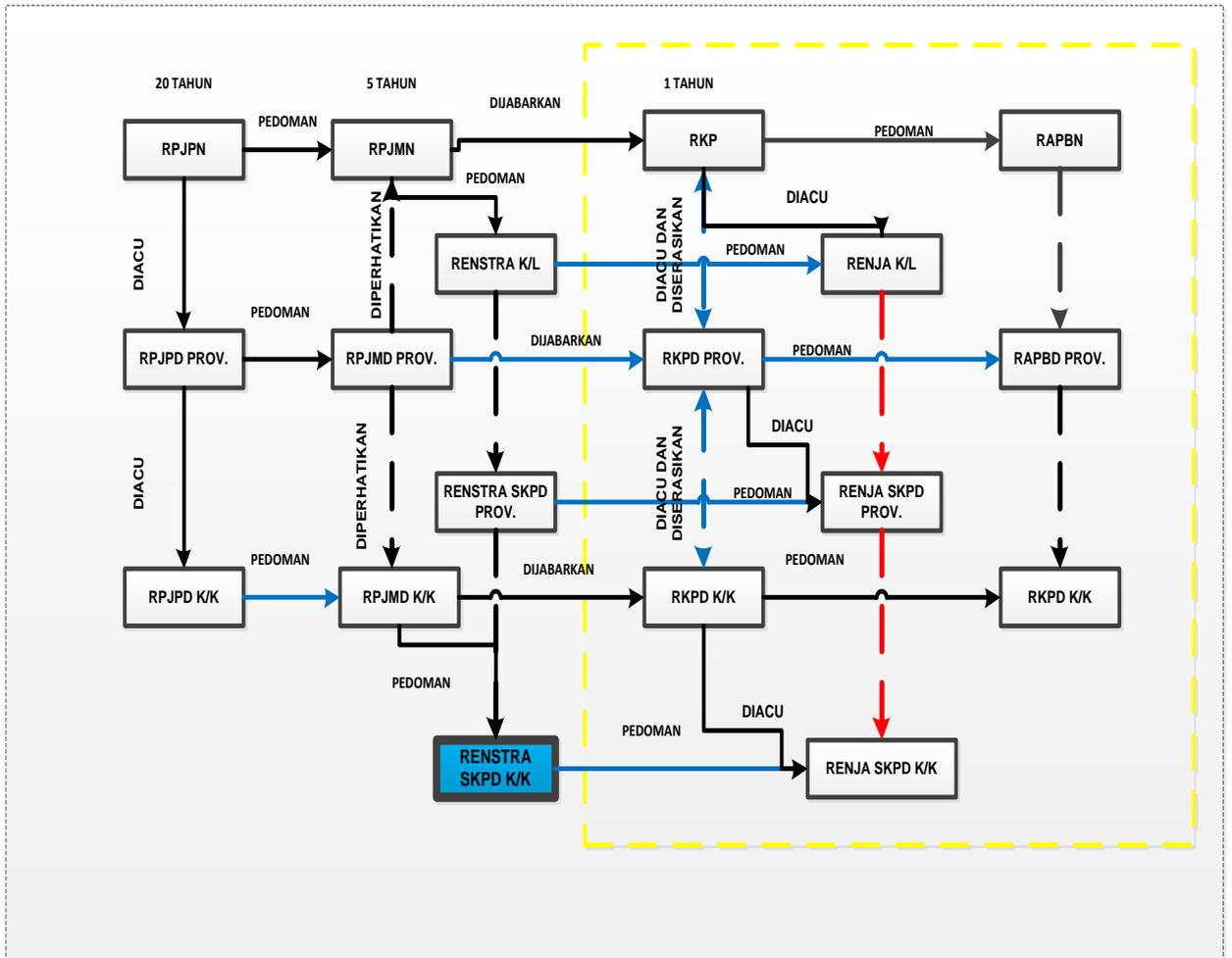
1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra SKPD

Keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24.a Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 24.a);

- m. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 31);
- n. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bappeda adalah:

1. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2016.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan

capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan tentang usul program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukkan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016.

Anggaran Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 2.576.427.000,- (termasuk perubahan) dengan 12 program dan 35 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.160.399.920,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 89,70 %, beberapa kegiatan tidak terlaksana 100 % dikarenakan proses administari dan keterbatasan waktu.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Di tahun anggaran 2015 terdapat beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana yaitu

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran

Kegiatan – kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai rencana dikarenakan masalah administrasi dan waktu seperti kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk lingkup sekretariat tidak terlaksana karena kegiatan serupa juga ada di masing-masing bidang bergantung lingkup koordinasi masing – masing bidang dengan SKPD terkait, sedangkan kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran terkendala waktu.

Sedangkan untuk tahun Anggaran tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp.3.733.658.000 terurai dalam 13 program dan 39 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*Pengarah*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, Renja yang disusun juga ditujukan memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan pencapaian Renstra Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Hasil dari rekapitulasi seperti tertuang pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dibandingkan tahun 2016 yaitu ada kegiatan di tahun 2017 sementara tahun 2016 tidak ada yaitu :

- Revisi RTRW
- Penyusunan KLHS
- Revisi RPJPD
- Revisi RPJMD

Kegiatan Revisi RTRW dilakukan setelah sebelumnya telah dilakukan Penyusunan Dokumen RTRW tetapi didalam perjalannya terdapat hal-hal yang harus disesuaikan terkait regulasi dan data, sedangkan Penyusunan KLHS adalah rangkaian awal dari revisi RPJPD dan RPJMD dimana didalam penyusunan ke 2 dokumen tersebut mengharuskan didalamnya terdapat kajian KLHS baik RPJPD maupun RPJMD.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016 berdasarkan pada indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Terwujudnya kerjasama antar kabupaten/kota, regional kota pare-pare yang mendukung pengembangan kluster unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas	Meningkatnya Informasi Tentang Potensi dan Prospek Pengembangan Potensi Produk Unggulan Daerah
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur	- Tersedianya layanan dan akses informasi dan komunikasi yang memadai - Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas	
Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan	- Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan sanitasi Terwujudnya Koordinasi

yang baik dan bersih	<p>pemerintah yang berkesinambungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel - Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Responsif Gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan 	Penyelenggaraan Penataan ruang Kab/Kota
----------------------	--	---

Berikut dikemukakan juga beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang di

laksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk mengetahui target pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada table 2.2 yang terdiri dari target renstra,realisasi capaian dan proyeksi.

Pada tabel 2 menggambarkan rencana program/kegiatan serta pencapaian kinerja SKPD sesuai dengan target renstra masing-masing SKPD

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Perencanaan
 - c. Subag Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang terdiri dari Sub Bidang Ekonomi dan Sub Bidang Sosial Budaya
 - b. Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari Sub Bidang Pertambangan Energi dan Pengembangan Wilayah dan Sub Bidang Pengairan, Perhubungan dan Telekomunikasi.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Analisis Ekonomi dan Sosial Budaya dan Sub Bidang Analisis Fisik Prasarana, data dan Informasi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah
- Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan, dan rencana kerja pembangunan daerah.
- Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat
2. Masih kurangnya sarana penunjang perencanaan
3. Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan
4. Belum mantapnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan Organisasi Pemerintah Daerah lainnya.
5. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hal ini bertujuan untuk merreview kembali apakah usulan program dan kegiatan yang telah tertuang pada rancangan awal renja sudah sesuai dan sinkron dengan rancangan Awal RKPD karena dimungkinkan dalam penyusunan rancangan awal renja memungkinkan ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun tersebut maka kegiatan tersebut dapat diprogramkan/dimasukkan didokumen rancangan RKPD dan selanjutnya dapat menjadi kegiatan pada periode RKPD.

Setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan renja, maka dijelaskan bahwa Renja Bappeda Tahun 2016 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016. Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut :

Pada tabel 3 menggambarkan tentang indicator kinerja, target kinerja yang terukur dan pagu indikatif masing-masing kegiatan serta hasil analisis kebutuhan setiap program dan kegiatan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan usulan yang dihasilkan pada pelaksanaan Musrenbang dan reses Anggota DPRD dibahas dan dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam astu forum dengan mempertimbangkan urgensi, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan berdasarkan budang koordinasi.

Sebgaimana tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai fungsi koordinasi terhadap proses perencanaan pembangunan maka dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mendapatkan usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat baik melalui pelaksanaan Musrenbang maupun hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 :

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB SIDRAP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi Perencanaan dan Penanggaran yang sifatnya koordinasi dan tidak memiliki usulan yang lahir melalui musrenbang, reses anggota DPRD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappeda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014–2018, seperti Visi dan misi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijelaskan pada Bab. I diatas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Tujuan	Indikator
Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholders	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan	Keselarasan perencanaan pembangunan
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, dan	Tercapainya Konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	pelaksanaan	
	Meningkatnya partisipasi seluruh stakeholders dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	Terjalinnnya koordinasi dalam kerjasama pembangunan daerah
		Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar
		Terwujudnya kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Menyediakan dan mengelola data/informasi, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan data dan informasi	Kemudahan mengakses data dan informasi
Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak	Terselenggaranya bimbingan teknis untuk peningkatan SDM Perencana	Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja 2017

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 – 2018 yaitu “ ***TERWUJUDNYASIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMAMASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT***”, dan sesuai dengan Visi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 yaitu “***Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat***”, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017 terdiri dari :

Program/KegiatanBappeda Tahun 2017

Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK,Materai,Perangko dan benda pos lainnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik,air dan telepontiap bulannya
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda empat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terbayarnya biaya perizinan kendaraan dinas roda empat dan dua
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor,uang lembur,ATK,barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya upah pihak ketiga dan tersedianya peralatan kebersihan
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya JasaPerbaikan Peralayan Kerja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan terbayarnya upah pihak ketiga
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terbayarnya belanja perjalanan dinas luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor,belanja ATK,cetak,peggandaan,makan minum harian,rapat,tamu dan upah/jasa pihak ketiga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya penataan halaman gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
Pengadaan Mobileur	Tersedianya keubileur kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Meubileur	Terpeliharannya Meubileur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Presentase capaian kinerja keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terselesaikannya jasa administrasi keuangan
Program Pengembangan data dan Informasi	Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan
Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Pengembangan system informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya system informasi perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok
Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinnnya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Terjalinnnya Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah Daerah
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin

Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin
Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
Revisi RTRW	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya Kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Tersusunnya Dokumen KLHS
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program-program pendampingan
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersusunnya dokumenmemorandum program sektor sanitasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Keikutsertaan aparat perencana meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Keikutsertaan aparat perencana meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD. Kabupaten, propinsi dan nasional
Revisi RPJPD	Tersusunnya RPJPD tahun 2005-2025
Revisi RPJMD	Tersusunnya RPJMD tahun 2014-2018
Penetapan RKPD	Terlaksananya penyusunan rancangan/draft akhir RKPD dan penetapan RKPD
Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)
Perda Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Sidrap	Tersusunnya Perda Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Sidrap
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi
Operasional Pelaksanaan Penelitian & Pengembangan	Terlaksananya operasional litbang
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan TKPKD
Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang sosial budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri
Operasional Pendamping WISMP	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif
Program Prima Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa&Kelurahan
Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.3

Rencana Program/Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Tabel 5 merupakan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing SKPD dan perkiraan maju 2018, pada tabel ini ditampilkan indicator kinerja, target kinerja yang terukur, lokasi dimana program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan rencana tahun 2017 dan perkiraan maju 2018. Data ini pula yang akan menjadi lampiran pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya kepada masyarakat kecil sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

TABEL 1
REKAPITULASI HASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100)	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	100	83.40	100	76.13	76.13	100	86.51	86.51	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK,Materai,Perangko dan benda pos lainnya	100	98.48	100	94.67	94.67	100	97.72	97.72	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik,air dan telepon tiap bulannya	100	70.20	100	65.08	65.08	100	78.43	78.43	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda empat	100	76.01	100	58.73	58.73	100	78.25	78.25	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor,uang lembur,ATK,barang cetakan dan penggandaan	100	98.61	100	94.25	94.25	100	97.62	97.62	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya upah pihak ketiga dan tersedianya peralatan kebersihan	100	87.01	100	93.59	93.59	100	93.53	93.53	
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya JasaPerbaikan Peralatan Kerja	100	88.02	100	16.62	16.62	100	68.21	68.21	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100	30.71	100	-	-	100	43.57	43.57	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan	100	14.17		-	-		0.00	0.00	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terbayarnya belanja perjalanan dinas luar daerah	100	77.66	100	99.70	99.70	100	92.45	92.45	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya belanja perjalanan dinas dalam daerah	100	98.13	100	0	-	100	66.04	66.04	
									260	3	86.51
									293	3.00	97.72
									235	3	78.43
									235	3	78.25
									293	3.00	97.62
									281	3	93.53
									205	3	68.21
									131	3	43.57
									14	3	4.72
									277	3	92.45
									198	3	66.04

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100	12
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor,belanja ATK,cetak,pengandaan,makan minum harian,rapat,tamu dan upah/jasa pihak ketiga	100	96.49	100	86.4	86.40	100	94.30	94.30	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	78.52	78.52	100	92.84	92.84	
	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Penataan halaman gedung kantor	100	99.99	100		-	100	67	67	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas/opersional	100		0	0	-		0	0	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	100	90.25	100	92.66	92.66	100	94.30	94.30	
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	100	98.33	100	77.88	77.88	100	92.07	92.07	
	Pengadaan Meubeleur	tersedianya meubeleur kantor	100	95	100		-	100	65.00	65.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	65.96	100	63.87	53.87	100	76.61	76.61	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100		100	89.66	89.66	100	63.22	63.22	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100		100	0	-	100	33.33	33.33	
	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	terpeliharanya meubeleur	100	76.19	100		-	100	58.73	58.73	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Presentase capaian kinerja keuangan	100	50.53	100	53.61	53.61	100	68.05	68.05	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	100	78.08	100	57.22	57.22	100	78.43	78.43	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terselesaikannya jasa administrasi keuangan	100	32.5	100	50.01	50.01	100	60.84	60.84	

93

283 3 94.30

279 3 92.84

200 3 66.66

- 3 -

283 3 94.30

276 3 92.07

195 3 65.00

230 3 76.61

190 3 63.22

100 3 33.33

176 3 58.73

204 3 68.05

235.30 3 78.43

183 3 60.84

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Catatan			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100	12			
	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realsasi anggaran	100	-	100	0	-	0	0.00	0.00		#VALUE!	3	#VALUE!
4	Program Pengembangan data dan Informasi	Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan	100	58.31	100	90.08	90.08	100	82.80	82.80		248	3	82.80
	Pengumpulan,updating,analisis,data info capaian target kinerja prog & keg	Tersedianya updating data & informasi	100	41.99	0	0	-	0	14.00	14.00		42	3	14.00
	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan	tersusunnya data/informasi sesuai kebutuhan	100	87.45	100	48.58	48.58		24.29	24.29		#VALUE!	3	#VALUE!
	Pengembangan data/informasi lainnya	tersusunnya data dan informasi lainnya	100	-	100	0	-	0	0.00	0.00		#VALUE!	3	#VALUE!
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok	100	48.9	100	72.54	72.54	100	73.81	73.81		221	3	73.81
	Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya Profil Daerah	100	57.50	100		-	0	19.17	19.17		58	3	19.17
	Pengembangan sistem informasi peencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Sistim Inforasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	-	100	74.56	74.56	100	58.19	58.19		#VALUE!	3	#VALUE!
5	Program Kerjasama Pembangunan	Terjalannya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah	100	2013	100	70.08	70.08	100	727.69	727.69		2,183	3	727.69
	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Terjalannya koordinasi dalam hal pemecahan masalah masalah daerah	100	20.13	100	70.08	70.08	100	63.40	63.40		190	3	63.40
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin	100	84.97	100	67.9	67.90	100	84.29	84.29		253	3	84.29
	Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin	100	84.97	100	67.9	67.90	100	84.29	84.29		253	3	84.29
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terpenuhinya SPM bidang Penataan Ruang	100	99.74	100		-	0	33.25	33.25		100	3	33.25

93

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Catatan			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100)	12			
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang	Terpenuhinya SPM bidang Penataan Ruang	100	99.74	100		-	0	33.25	33.25		100	3	33.25
8	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100		100		-	100	33.33	33.33		100	3	33.33
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	tersusunnya laporan penyerapan /realisasi fisik dan keuangan DAK	100	32.01	100	0		0	10.67	0.00		32	3	10.67
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersusunnya Dokumen KLHS	100	86.86	100		-	0	28.95	28.95		87	3	28.95
9	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-	100	85.76	100	79.53	79.53	100	88.43	88.43		265	3	88.43
	Koordinasi Perencanaan Pusat-Pusat Pendidikan	Terkoordinasinya kegiatan pusat pusat pendidikan	100	90.55	100		-	100	0.00	0.00		191	3	63.52
	Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program-program	100	79.95	100	89.29	89.29	100	89.75	89.75		269	3	89.75
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersusunnya dokumenmemorandum program sektor sanitasi	100	87.5	100	69.77	69.77	100	85.76	85.76		257	3	85.76
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Keikutsertaan aparat perencana meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	100	-	0	0	-	100	0	0		#VALUE!	3	#VALUE!
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan perencanaan	100	-	0	0	-	0	0	0		#VALUE!	3	#VALUE!
												-	3	-

93

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100)	12
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD,Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi	100	91.79	100	91.02	91.02	100	94.27	94.27	
	Penyusunan RPJMD	Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD	100	89.06			-	0	0.00	0.00	
	Musrenbang RPJMD	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	100	90.91			-	0	0.00	0.00	
	Penetapan RPJMD	Tersusunnya Perda RPJMD	100	89.56			-	0	0.00	0.00	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD. Kabupaten, propinsi dan nasional	100	98.32	100	93.26	100.00	100	97.19	97.19	
	Penetapan RKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)	100	95.01	100	95.4	95.40	100	96.80	96.80	
	Monev,pengendalian dan pelaporan	Terlaksananya Monev	100		100	85.73	89.40	100	61.91	61.91	
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)	100	65.09	100	87.72	87.72	100	84.27	84.27	
12	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi	100	42.38	100	77.62	77.62	100	73.33	73.33	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi	100	82.49	100	76.66	76.66	100	86.38	86.38	
	Operasional Pelaksanaan Litbang	Tersedianya Data Produktivitas Padi	100		100	86.87	86.87	100	62.29	62.29	
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan TPKD	100	28.06	100	69.34	69.34	100	65.80	65.80	
13	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya	38.74	46.81	100	34.32	34.32	100	60.38	77.93	

93

283	3	94.27
	3	-
	3	-
	3	-
292	3	97.19
290	3	96.80
186	3	61.91
253	3	84.27
220	3	73.33
259	3	86.38
187	3	62.29
197	3	65.80
181	3	60.38

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016		Catatan			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100)	12			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya	100	46.81	100	87.50	87.50	100	78.10	78.10		234	3	78.10
	Monitoring & Evaluasi Kesehatan Gratis	terlaksananya program kesehatan gratis sesuai	100		100	9.76	9.76	100	36.59	36.59		110	3	36.59
	Monitoring & Evaluasi Pendidikan Gratis	terlaksananya program pendidikan gratis sesuai aturan	100		100	5.71	5.71	100	35.24	35.24		106	3	35.24
14	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri	100	86.48	100	86.27	86.27	100	90.92	90.92		273	3	90.92
	Operasional Pendamping WISMP	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif	100	86.48	100	86.27	86.27	100	90.92	90.92		273	3	90.92
15	Program Prima Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa&Kelurahan	100	67.59	100	91.86	91.86	100	86.48	86.48		259	3	86.48
	Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100	67.59	100	91.86	91.86	100	86.48	86.48		259	3	86.48

93



0.03 97.72

0.04 78.43

0.04 78.25

0.03 97.62

0.03 93.53

0.04 68.21

0.07 43.57

0.64

0.03

0.05

0.03

89.66 89.66 100 279.32 3 93.106667

0.05

136.03 2 68.015

74.56 100 174.56 3 58.19

